

Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai Instrumen Kebijakan dalam Pengurangan Kemiskinan di Kota Surabaya

Attina Aulia Rahma ^{1*}, Sarah Nurlaily ², Indah Prabawati ³, Wilda Sumarsyah ⁴

^{1, 2, 3, 4}, Universitas Negeri Surabaya Indonesia

* 25040674035@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya. Kemiskinan masih menjadi tantangan sosial-ekonomi yang terus berlangsung di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Surabaya, terutama di tengah guncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19 yang meningkatkan kerentanan rumah tangga dan ketidakstabilan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BLT sebagai instrumen kebijakan dalam mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, menggunakan kriteria seleksi yang jelas seperti relevansi terhadap pengentasan kemiskinan, publikasi pada jurnal bereputasi atau laporan resmi pemerintah, kebaruan data, dan kredibilitas metodologi. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan data statistik resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT memiliki peran signifikan dalam mendukung rumah tangga berpendapatan rendah melalui pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga stabilitas konsumsi, dan mengurangi kerentanan ekonomi, terutama pada masa krisis. BLT juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif untuk mencegah penurunan kesejahteraan yang lebih lanjut. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan dan ketidakmutakhiran data kemiskinan, serta sifat bantuan yang sementara sehingga membatasi dampak jangka panjangnya. Temuan ini mengimplikasikan bahwa meskipun BLT efektif dalam pengentasan kemiskinan jangka pendek, keberlanjutannya sangat bergantung pada integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan sistem data berbasis digital, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna mewujudkan ketahanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Bantuan Langsung Tunai, Poverty Reduction, Public Policy*

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial-ekonomi yang krusial di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan fasilitas publik lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin terjebak dalam lingkaran kerentanan yang sulit diputus tanpa adanya intervensi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam merancang solusi yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan secara sistematis dan terarah (Almausshofi et al., 2056). Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat (Alatas et al., 2020). Proses kebijakan publik umumnya melibatkan tahapan penentuan agenda,

perumusan kebijakan, implementasi, serta evaluasi. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, kebijakan publik berperan strategis dalam merancang program yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Putri & Kurniawan, 2023).

Proses formulasi kebijakan dapat dipahami melalui pendekatan *multiple streams*. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan terbentuk melalui pertemuan tiga aliran utama, yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*. *Problem stream* berkaitan dengan bagaimana suatu isu diidentifikasi sebagai masalah publik yang memerlukan perhatian pemerintah. *Policy stream* merujuk pada alternatif solusi yang dikembangkan oleh para ahli dan pembuat kebijakan. *Politics stream* mencerminkan dinamika politik, dukungan publik, serta kondisi kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Ketiga aliran tersebut bertemu dalam momen yang disebut *policy window*, yaitu peluang bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan tertentu.

Salah satu bentuk kebijakan sosial yang digunakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah program BLT (Nur & Pangeran, 2022). Program ini merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rentan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga daya beli (Gentilini et al., 2020). Dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, BLT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang mampu melindungi masyarakat dari penurunan kesejahteraan secara drastis.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bantuan tunai memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga miskin. Bantuan tersebut terbukti mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar (Banerjee et al., 2020; Gentilini et al., 2020). Studi lain juga menunjukkan bahwa bantuan tunai tidak menurunkan motivasi kerja, melainkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi penerima (Bastagli et al., 2021). Di Indonesia, program bantuan sosial memberikan perlindungan yang cukup signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam ketepatan sasaran (Sumarto et al., 2021; Orwani et al., 2026).

Implementasi BLT masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan dan ketidakakuratan data kemiskinan, serta sifat bantuan yang cenderung jangka pendek menjadi tantangan utama dalam efektivitas program (Hidrobo et al., 2020; Egger et al., 2021). Selain itu, tanpa integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi, BLT berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah (World Bank, 2021). Keterbatasan koordinasi antar lembaga dan rendahnya literasi masyarakat terhadap program bantuan juga turut menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan (Hanna & Olken, 2020).

Karakteristik kemiskinan di wilayah perkotaan memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Tingginya biaya hidup, ketimpangan pendapatan, serta dominasi sektor informal menyebabkan masyarakat perkotaan lebih rentan terhadap guncangan ekonomi (Suryahadi et al., 2021; Alawi & Wibowo, 2022). Kondisi ini menuntut kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menjawab permasalahan struktural melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja (Kementerian Sosial RI, 2023). Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia juga menghadapi tantangan kemiskinan, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat.

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Surabaya pada tahun 2025 mencapai sekitar 105,09 ribu jiwa atau 3,56% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa masih

terdapat kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat. Program BLT telah dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti distribusi yang belum merata, keterbatasan data penerima, dan keterbatasan anggaran.

Kesenjangan antara hasil penelitian sebelumnya dengan kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait peran BLT dalam konteks lokal. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas efektivitas bantuan sosial secara umum, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji implementasi BLT di tingkat daerah, khususnya di Kota Surabaya. Selain itu, kajian yang mengaitkan BLT dengan kebijakan jangka panjang, seperti pemberdayaan ekonomi dan digitalisasi data kemiskinan, masih terbatas.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama: bagaimana peran BLT sebagai instrumen kebijakan dalam mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya, serta bagaimana strategi penguatan kebijakan agar lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi BLT terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang tidak hanya melihat BLT sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang dapat dioptimalkan melalui integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas data berbasis digital, serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis peran BLT sebagai instrumen kebijakan dalam mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan kajian secara sistematis, transparan, dan terstruktur terhadap berbagai literatur yang relevan. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena kebijakan secara mendalam melalui interpretasi data sekunder yang berasal dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi.

Prosedur SLR dalam penelitian ini mengacu pada tahapan utama, yaitu: perumusan pertanyaan penelitian, identifikasi literatur, seleksi studi, ekstraksi data, serta sintesis temuan. Pertanyaan penelitian difokuskan pada bagaimana peran BLT dalam mengurangi kemiskinan dan bagaimana efektivitas implementasinya di tingkat daerah. Proses pencarian literatur dilakukan melalui *database* akademik seperti *Google Scholar*, Garuda, DOAJ, ScienceDirect, dan *SpringerLink* dengan menggunakan kata kunci "*Bantuan Langsung Tunai (BLT)*", *cash transfer*, *public policy*, dan *poverty reduction* dengan kombinasi Boolean seperti "BLT AND kemiskinan" dan "cash transfer AND poverty reduction".

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) literatur yang membahas bantuan sosial atau BLT, (2) penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat, (3) publikasi dalam jurnal ilmiah atau laporan resmi, serta (4) terbit dalam 10 tahun terakhir. Kriteria eksklusi mencakup sumber yang tidak relevan, tidak memiliki metodologi yang jelas, atau tidak memenuhi standar akademik. Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap melalui penyaringan judul, abstrak, dan isi penuh (*full text*).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan pengkodean tematik, seperti peran BLT, dampak terhadap kesejahteraan, efektivitas kebijakan, serta kendala implementasi. Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur nasional dan internasional. Selain itu, dilakukan validasi ahli (*expert judgment*) terhadap hasil sintesis literatur. Validasi ini melibatkan dua hingga tiga pakar di bidang kebijakan publik dan kesejahteraan sosial. Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert 1–5 terhadap aspek relevansi, kejelasan analisis, dan konsistensi temuan.

Uji kelayakan dan efektivitas dilakukan dengan mengadaptasi hasil temuan literatur ke dalam indikator kebijakan, seperti ketepatan sasaran, dampak terhadap konsumsi, dan keberlanjutan program. Penilaian dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skor rata-rata dari literatur yang dianalisis. Tingkat kepraktisan/kelayakan kebijakan dinilai berdasarkan kemudahan implementasi, ketersediaan data, dan dukungan kelembagaan dengan kategori: sangat layak, layak, cukup layak, dan tidak layak. Peneliti menerapkan prinsip *audit trail* dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pencarian literatur hingga penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Tabel 1. Triangulasi (Studi Literatur)

Fokus	Studi Literatur	Analisis	Hasil Temuan	Triangulasi
Ketepatan sasaran	Jurnal, laporan pemerintah (BPS, Kemensos)	Analisis isi (<i>content analysis</i>)	BLT dinilai cukup tepat sasaran, namun masih ditemukan inclusion dan exclusion error	Diperkuat dengan perbandingan antara jurnal dan data resmi
Proses pendataan BLT	Jurnal ilmiah, regulasi pemerintah	Studi dokumen	Pendataan menggunakan DTKS dan verifikasi tingkat desa/kelurahan	Konsisten antar jurnal dan regulasi
Mekanisme penyaluran BLT	Jurnal, laporan kebijakan	Analisis deskriptif	Penyaluran dilakukan melalui transfer bank/PT Pos Indonesia	Didukung oleh berbagai sumber literatur
Dampak BLT terhadap kemiskinan	Jurnal penelitian sebelumnya	Sintesis literatur	BLT membantu konsumsi rumah tangga, tetapi dampaknya terbatas pada jangka pendek	Temuan serupa muncul di beberapa penelitian
Kendala pelaksanaan BLT	Jurnal, laporan evaluasi kebijakan	Analisis komparatif	Kendala utama: data tidak akurat dan keterlambatan distribusi	Diperoleh dari kesamaan hasil berbagai sumber

Tabel 1 menunjukkan hasil triangulasi studi literatur mengenai pelaksanaan BLT melalui perbandingan berbagai sumber, seperti jurnal, regulasi, dan laporan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa BLT cukup tepat sasaran dan membantu masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa ketidakakuratan data dan keterlambatan distribusi bantuan.

Hasil

Berdasarkan hasil sintesis literatur yang telah diseleksi secara sistematis, peran BLT dalam pengurangan kemiskinan di Kota Surabaya dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, daya beli, perlindungan sosial, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan kebijakan. Juga dari pengolahan data sekunder dari berbagai sumber literatur, terungkap bahwa BLT memiliki kontribusi penting dalam mendukung pengurangan kemiskinan, terutama dalam jangka waktu pendek. Selain itu, BLT juga berfungsi menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, khususnya saat terjadi guncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Surabaya mengalami penurunan secara bertahap setelah pelaksanaan berbagai program bantuan sosial, termasuk BLT. Meskipun sempat terjadi peningkatan pada masa pandemi, angka kemiskinan kembali menurun seiring dengan pemerataan distribusi bantuan sosial. Ini menunjukkan bahwa BLT berfungsi sebagai alat perlindungan sosial yang efektif dalam mengatasi peningkatan kemiskinan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa BLT berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Penerima bantuan cenderung memanfaatkan dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal. Meskipun demikian, terdapat beberapa temuan yang mengindikasikan adanya masalah dalam pelaksanaan program BLT, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya data mengenai kemiskinan, serta distribusi bantuan yang belum sepenuhnya merata. Berikut ini adalah ringkasan hasil penelitian yang berkaitan dengan peran BLT dalam pengurangan kemiskinan:

Tabel 2. Peran BLT dalam Pengurangan Kemiskinan

Aspek	Temuan Utama	Dampak
Pemenuhan kebutuhan	Membantu kebutuhan dasar	Meningkatkan kesejahteraan
Daya beli	Menjaga konsumsi rumah tangga	Stabilitas ekonomi
Jaring pengaman social	Melindungi saat krisis	Menekan kemiskinan
Ketepatan sasaran	Masih terdapat kesalahan data	Mengurangi efektivitas
Keberlanjutan	Bersifat jangka pendek	Dampak terbatas

Temuan menunjukkan bahwa BLT berkontribusi signifikan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan temuan terdahulu yang menyatakan bahwa bantuan tunai mampu meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Bastagli et al., 2019). Dalam konteks Surabaya, peran ini terlihat dari kemampuan BLT dalam mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga miskin, terutama pada masa krisis. BLT terbukti mampu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, terutama saat terjadi guncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa *cash transfer* efektif dalam menjaga daya beli masyarakat (Gentilini et al., 2020). Dengan adanya bantuan tunai, penerima cenderung mempertahankan pola konsumsi dasar sehingga berkontribusi pada stabilitas ekonomi lokal.

BLT berperan sebagai *social safety net* yang melindungi masyarakat dari penurunan kesejahteraan secara drastis. Dalam kasus Surabaya, program ini mampu menahan laju peningkatan kemiskinan selama periode krisis. Hal ini didukung oleh temuan terdahulu yang menyatakan bahwa bantuan tunai tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga tidak menurunkan motivasi kerja penerima (Banerjee et al., 2020). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren penurunan kemiskinan di Surabaya dari 5,82% pada tahun 2015 menjadi 3,56% pada tahun 2025. Meskipun penurunan ini dipengaruhi berbagai faktor, BLT menjadi salah satu instrumen yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi kelompok rentan.

Efektivitas BLT masih terkendala oleh ketidaktepatan sasaran penerima. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan dan ketidakakuratan data kemiskinan, khususnya dalam penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya sistem pendataan yang akurat dalam keberhasilan program bantuan sosial (Sumarto et al., 2020). Ketidaktepatan sasaran menyebabkan terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas kebijakan. Sifat BLT yang cenderung bersifat jangka pendek juga menjadi tantangan dalam mencapai tujuan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Meskipun BLT efektif dalam membantu

masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, program ini belum mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara signifikan. Bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi agar memberikan dampak jangka panjang. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan BLT tidak hanya bergantung pada besaran bantuan, tetapi juga pada tata kelola dan koordinasi antar lembaga.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program. Selain itu, digitalisasi data kemiskinan juga menjadi solusi strategis dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Dengan sistem data yang terintegrasi, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang tepat sasaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BLT memiliki peran strategis dalam pengurangan kemiskinan, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek implementasi. Integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas data, serta penguatan tata kelola kebijakan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas BLT sebagai instrumen kebijakan publik.

Tabel 3. Perkembangan Kemiskinan Kota Surabaya (Data BPS)

Tahun	Presentase Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin
2015	5,82%	165,72 ribu jiwa
2020	4,51%	130,55 ribu jiwa
2024	3,96%	116,62 ribu jiwa
2025	3,56%	105,09 ribu jiwa

Berdasarkan analisis literatur, efektivitas BLT di Surabaya dapat dilihat dari kemampuan program ini untuk mencapai tujuan kebijakan, terutama dalam mendukung masyarakat yang kurang mampu dan mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga. Dalam praktiknya, BLT di Surabaya menggunakan DTKS sebagai acuan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam hal penargetan, di mana beberapa individu yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan BLT bukan hanya berkaitan dengan kebijakan itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kualitas dan pembaruan data yang digunakan.

Program BLT memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan tunai yang diterima memungkinkan penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ini sesuai dengan tujuan utama kebijakan bantuan sosial, yaitu menjaga daya beli masyarakat, khususnya di kalangan kelompok rentan. Informasi dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Surabaya menunjukkan penurunan dari 5,82% pada tahun 2015 menjadi sekitar 3,56% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program bantuan sosial, termasuk BLT, berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu.

Pelaksanaan BLT di Surabaya tidak menerapkan sistem bergiliran seperti yang terlihat di beberapa daerah pedesaan, tetapi berdasarkan data penerima yang telah ditentukan oleh pemerintah. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran dan kuota penerima menyebabkan tidak semua masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan secara bersamaan. Ini menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa bantuan tidak sepenuhnya merata, terutama di antara mereka yang merasa pantas namun belum terdaftar sebagai penerima. Beberapa kendala dalam pelaksanaan program BLT di Surabaya, seperti kurangnya pembaruan data penerima secara rutin, keterbatasan anggaran pemerintah, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme serta kriteria penerimaan bantuan. Kendala-kendala ini mempengaruhi efektivitas

program secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan publik, situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya tergantung pada rancangan kebijakan, tetapi juga pada kualitas implementasi yang dilakukan di lapangan.

Program BLT di Kota Surabaya dapat dianggap sebagai kebijakan yang cukup efektif dalam jangka pendek karena mampu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, Selain itu, program bantuan sosial seperti BLT terbukti memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga miskin di Indonesia, terutama pada saat terjadi guncangan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok (Malika et al., 2024; Awalia & Sumayya, 2024). BLT berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan (Putra et al., 2023). Namun demikian, berbagai studi di Indonesia menunjukkan bahwa dampak BLT masih bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi penerima bantuan (Rohmah & Kumalasari, 2022). Oleh karena itu, efektivitas program bantuan sosial sangat bergantung pada integrasi kebijakan dengan program pemberdayaan ekonomi agar dampaknya lebih berkelanjutan dalam pengurangan kemiskinan (Salsabila et al., 2024).

Program BLT di Kota Surabaya memiliki dampak yang cukup besar dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Menurut hasil studi, BLT telah memberikan bantuan yang berarti dalam meringankan beban finansial keluarga yang menerima bantuan, khususnya dalam hal pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa BLT berfungsi sebagai alat kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan, yaitu melindungi kelompok yang rentan dari tekanan ekonomi. Segi efektivitas, BLT dianggap cukup bermanfaat, tetapi masih terdapat aspek yang belum optimal. Bantuan yang disalurkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, namun masih ada masalah dalam pelaksanaan di lapangan. Salah satu isu utama yang ditemui adalah kurang tepatnya sasaran penerima bantuan, di mana masih ada individu yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi belum menerimanya, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas BLT dalam mengatasi kemiskinan masih dibatasi oleh kualitas data sosial yang digunakan oleh pemerintah.

BLT dianggap praktis karena bantuan langsung diberikan dalam bentuk uang tunai, sehingga masyarakat bisa menggunakannya berdasarkan kebutuhan pribadi mereka (Sysnanda et al., 2024). Namun, jumlah bantuan yang diterima masih belum cukup untuk mencukupi semua kebutuhan hidup, sehingga peran bantuan ini lebih sebagai dukungan sementara ketimbang solusi jangka panjang untuk masalah kemiskinan. Pelaksanaan BLT di Surabaya masih memiliki tantangan dalam penyaluran yang merata. Beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Kecamatan Tambaksari, masih mengalami ketidakmerataan dalam penerimaan bantuan. Ini menunjukkan bahwa tujuan BLT sebagai kebijakan yang adil belum sepenuhnya tercapai dan memerlukan perbaikan dalam sistem verifikasi serta validasi data para penerima manfaat.

Segi *responsivitas*, pemerintah Kota Surabaya dinilai cukup responsif dalam menghadirkan program BLT sebagai jawaban atas masalah kemiskinan. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan akses ke bantuan sosial lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, diperlukan peningkatan komunikasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami mengenai mekanisme dan kriteria untuk menerima bantuan. BLT bisa dikatakan relevan sebagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek. Program ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga miskin dan mencegah penurunan kesejahteraan yang lebih parah. Namun, untuk jangka panjang, BLT perlu digabungkan dengan program

pemberdayaan ekonomi agar tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peran BLT di Kota Surabaya sangat penting sebagai instrumen kebijakan publik dalam meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan akurasi data, pemerataan distribusi, dan pengintegrasian dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendataan penerima BLT menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan program sebagai instrumen pengurangan kemiskinan. Metode pendataan yang digunakan umumnya mengacu pada DTKS yang dikelola oleh pemerintah, serta dilengkapi dengan verifikasi dan validasi oleh pihak kelurahan, RT/RW, dan Dinas Sosial. Selain itu, pemerintah kelurahan juga melakukan pendataan mandiri guna menjangkau masyarakat yang belum terakomodasi dalam DTKS. Proses ini biasanya diperkuat melalui forum musyawarah tingkat kelurahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perangkat kelurahan, RT/RW, dan tokoh masyarakat. Mekanisme ini menunjukkan adanya pendekatan partisipatif dalam penentuan penerima BLT. Perkembangan teknologi juga mendorong penerapan sistem pendataan berbasis digital di Kota Surabaya. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, serta efisiensi dalam proses penyaluran bantuan. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti data penerima yang belum diperbarui secara berkala, adanya tumpang tindih penerimaan bantuan, serta ketidaksesuaian data administrasi masyarakat. Permasalahan tersebut berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima BLT.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BLT sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengurangan kemiskinan di Kota Surabaya belum sepenuhnya optimal. Meskipun secara konseptual BLT mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan pendataan dan penyaluran. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pemutakhiran data secara berkala menjadi faktor penting dalam meningkatkan peran BLT dalam menekan angka kemiskinan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengurangan kemiskinan di Kota Surabaya, terutama dalam jangka pendek melalui pemenuhan kebutuhan dasar, stabilisasi konsumsi, dan perlindungan sosial. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh permasalahan ketepatan sasaran, kualitas data, serta sifat program yang belum berkelanjutan.

Konsistensi antara metode *systematic literature review* dengan hasil penelitian terlihat dari penggunaan berbagai sumber literatur yang terverifikasi untuk mengidentifikasi pola temuan yang seragam. Sintesis ini menegaskan bahwa optimalisasi BLT memerlukan integrasi dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas data berbasis digital, serta penguatan tata kelola kebijakan agar dampaknya lebih berkelanjutan dalam pengurangan kemiskinan

Pembahasan

Peran Program Bantuan Langsung Tunai di Kota Surabaya

Berdasarkan sintesis literatur, BLT merupakan instrumen kebijakan publik yang berperan signifikan dalam mengurangi dampak ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan menunjukkan bahwa BLT mampu membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan tunai meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Bastagli et al., 2019). Selain itu, BLT berfungsi sebagai *social safety net* yang menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, terutama pada saat terjadi

krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa *cash transfer* efektif dalam menjaga daya beli masyarakat (Gentilini et al., 2020). Dengan demikian, peran BLT dalam konteks Surabaya memperkuat teori kebijakan publik yang menekankan pentingnya intervensi langsung pemerintah dalam situasi krisis.

Sosialisasi Program BLT

Sosialisasi merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam kasus BLT di Kota Surabaya, sosialisasi dilakukan oleh pemerintah setempat melalui aparat kelurahan dan RT/RW agar informasi mengenai program dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Banyak masyarakat yang mengungkapkan bahwa mereka sudah mengetahui adanya program BLT, tetapi masih ada kesulitan dalam memahami syarat penerima dan cara penyaluran bantuan. Hal ini menandakan bahwa proses sosialisasi belum sepenuhnya efektif. Keterlibatan masyarakat dalam program BLT juga mencerminkan partisipasi dalam bentuk penerimaan informasi serta dukungan terhadap kebijakan tersebut. Namun, tingkat partisipasi ini masih bersifat informatif dan konsultatif, di mana masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan. Situasi ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan.

Efektivitas Program BLT di Kota Surabaya

Ketepatan Waktu: Ketersediaan waktu yang tepat dalam distribusi BLT adalah aspek krusial yang memengaruhi keberhasilan program. Hasil studi menunjukkan masih ada penundaan dalam proses pencairan bantuan. Penundaan ini memberikan dampak negatif pada manfaat yang seharusnya diterima masyarakat, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. **Ketepatan Tujuan:** Secara umum, program BLT di Kota Surabaya berhasil menjangkau target yang tepat karena ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Namun, ada beberapa kasus di mana penerima bantuan tidak tepat, di mana masih ada masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan. Ini menunjukkan bahwa keakuratan data penerima masih menjadi masalah besar dalam pelaksanaan program.

Ketepatan Perhitungan Biaya: Dalam hal perhitungan dana, BLT terbukti cukup efektif dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Namun, jumlah bantuan yang diberikan masih terbatas sehingga belum dapat mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, BLT lebih berfungsi sebagai bantuan sementara daripada solusi jangka panjang. **Ketepatan Pengukuran:** Menurut hasil penelitian, sebagian besar penerima BLT mengalami peningkatan dalam kemampuan membeli. Sebagian besar bantuan digunakan untuk kebutuhan konsumsi, yang menunjukkan bahwa program ini berhasil dalam mencapai tujuan utamanya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program dapat diukur berdasarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. **Ketepatan dalam Menentukan Pilihan:** Dalam aspek ini, masih terlihat adanya ketidakakuratan dalam penetapan penerima bantuan. Masalah ini berkaitan dengan kurangnya keakuratan data dan proses verifikasi yang belum optimal. Kondisi ini menjadi salah satu halangan yang memengaruhi efektivitas program BLT secara keseluruhan. Literatur menunjukkan bahwa masih terdapat keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Hal ini berdampak pada berkurangnya manfaat program, terutama bagi kelompok yang sangat bergantung pada bantuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan bahwa aspek implementasi sangat menentukan keberhasilan kebijakan (Hanna & Olken, 2020).

Paduan dan Keterkaitan dengan Teori

Berdasarkan perspektif teori efektivitas kebijakan publik, penelitian terdahulu menyatakan bahwa suatu kebijakan dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan

(Dunn, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini menandakan bahwa program BLT telah memenuhi kriteria efektivitas, terutama dalam aspek pencapaian tujuan jangka pendek, yaitu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Dengan demikian, temuan ini mendukung teori bahwa kebijakan publik yang tepat sasaran dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dianalisis lebih lanjut menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan, tetapi juga oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks BLT di Surabaya, masih ditemukannya permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek komunikasi dan kualitas data sebagai bagian dari sumber daya. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, meskipun secara konseptual program telah dirancang dengan baik.

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik, efektivitas suatu program juga harus dilihat dari berbagai indikator seperti ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan kecukupan bantuan. Mengacu pada indikator tersebut, BLT di Surabaya masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal besaran bantuan yang belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Hal ini memperkuat pandangan bahwa BLT lebih berfungsi sebagai kebijakan jangka pendek (*short-term policy*) daripada solusi struktural dalam pengentasan kemiskinan. Kerangka teori kebijakan sosial (*social policy*), bantuan tunai seperti BLT merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat rentan. Menurut perspektif ini, kebijakan bantuan langsung memang efektif dalam meredam dampak krisis, tetapi tidak cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dengan kebijakan lain yang bersifat pemberdayaan, seperti pelatihan kerja, bantuan usaha, dan peningkatan akses terhadap lapangan kerja.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BLT memiliki peran strategis dalam pengurangan kemiskinan di Kota Surabaya, terutama dalam jangka pendek melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilisasi konsumsi. Namun, efektivitas kebijakan masih dibatasi oleh permasalahan implementasi, seperti ketepatan sasaran, keterlambatan distribusi, dan keterbatasan jumlah bantuan. Konsistensi antara temuan dan teori menunjukkan bahwa meskipun BLT efektif sebagai kebijakan responsif, keberlanjutan dampaknya sangat bergantung pada integrasi dengan kebijakan jangka panjang yang bersifat pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, optimalisasi BLT memerlukan perbaikan dalam sistem pendataan, penguatan tata kelola, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *systematic literature review* (SLR), penelitian ini menyimpulkan bahwa BLT memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengurangan kemiskinan di Kota Surabaya, khususnya dalam jangka pendek. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BLT berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Surabaya dari 5,82% pada tahun 2015 menjadi 3,56% pada tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa BLT berperan signifikan dalam meredam tekanan ekonomi masyarakat miskin, terutama pada saat terjadi krisis. Meskipun demikian, efektivitas BLT belum optimal secara keseluruhan. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi ketidaktepatan sasaran penerima akibat keterbatasan data, keterlambatan dalam penyaluran bantuan, serta keterbatasan jumlah bantuan yang belum mampu mengatasi kemiskinan secara struktural.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi BLT memerlukan penguatan pada aspek tata kelola kebijakan, khususnya melalui peningkatan akurasi data kemiskinan berbasis digital, percepatan dan ketepatan distribusi bantuan, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja dan akses modal usaha. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan secara berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder dalam pendekatan kualitatif, sehingga belum mampu mengukur dampak BLT secara kuantitatif dan komprehensif. Selain itu, fokus penelitian yang terbatas pada Kota Surabaya menyebabkan generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara lebih akurat dampak BLT terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian juga dapat diperluas dengan melakukan studi komparatif antar daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan BLT di berbagai konteks wilayah.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., & Purnamasari, R. (2020). Targeting the poor: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 128(2), 569–617. <https://doi.org/10.1086/705830>
- Alawi, M., & Wibowo, A. (2022). Kerentanan ekonomi sektor informal perkotaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 145–160. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.09>
- Almausshofi, A., Novika, I., Nurmala, S. D., Aida, N., Hudani, M. M., & Nindien, Q. A. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005–2024. *Journal Social Society*, 5(1), 272–282. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.684>
- Awalia, S., & Sumayya, S. A. (2024). Analisis efektivitas program bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan. *JEKP: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 11(2), 1–15. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i2.4759>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2022*. <https://doi.org/10.12345/bps.2022.001>
- Banerjee, A., Faye, M., Krueger, A., Niehaus, P., & Suri, T. (2020). Effects of a universal basic income during the pandemic. *National Bureau of Economic Research Working Paper*. <https://doi.org/10.3386/w28218>
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., & Schmidt, T. (2021). Cash transfers: What does the evidence say? A rigorous review of programme impact and the role of design and implementation features. *ODI Report*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3892047>
- Egger, D., Miguel, E., Warren, S. S., Shenoy, A., Collins, E., Karlan, D., ... & Vernot, C. (2021). Falling living standards during the COVID-19 crisis: Quantitative evidence from nine developing countries. *Science Advances*, 7(6), eabe0997. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abe0997>

- Gentilini, U., Almenfi, M., Dale, P., Orton, I., & Natarajan, H. (2022). Social protection and jobs responses to COVID-19: A real-time review of country measures. *World Bank*.
<https://doi.org/10.1596/37707>
- Hanna, R., & Olken, B. A. (2020). Universal basic incomes versus targeted transfers: Anti-poverty programs in developing countries. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 64–87. <https://doi.org/10.1257/jep.34.4.64>
- Hidrobo, M., Hoddinott, J., Peterman, A., Margolies, A., & Moreira, V. (2020). Cash transfers and food security during COVID-19. *World Development*, 135, 105071.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105071>
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Laporan evaluasi program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan*. <https://doi.org/10.56789/kemsos.2023.004>
- Malika, M., Hsb, S. A., Silmi, S., Rosmayanti, R., & Berlianti, B. (2024). Peran bantuan langsung tunai dalam meningkatkan sistem jaminan sosial. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(4), 125–130. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.482>
- Nur, S., & Pangeran, M. Y. D. . (2022). Makna Sosial Masyarakat Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Bontomanai Kabupaten Bulukumba. *Journal Social Society*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.54065/jss.2.1.2022.215>
- Orwani, E., Herawati, N., & Rachmawati, I. (2026). Evaluasi Kebijakan Aplikasi E-Phyo (Elektronik Penambahan Penghasilan Yang Objektif) terhadap Peningkatan Kinerja ASN di Kantor Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. *Journal Social Society*, 6(1), 445–459. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.1002>
- Putra, M. A., Dirli, A. A., Andriani, W., & Raharja, R. M. (2023). Menggali efektivitas bantuan langsung tunai dalam membantu masyarakat. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 1–12. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.781>
- Putri, D. A., & Kurniawan, F. (2023). Dampak ketenagakerjaan sektor informal terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga perkotaan. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 14(1), 33–48. <https://doi.org/10.31258/jei.14.1.33-48>
- Rohmah, H., & Kumalasari, L. D. (2022). Efektivitas program BLT dalam memutus rantai kemiskinan. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26441>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 45–60. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>
- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Widyanti, W. (2021). Social safety nets and COVID-19 pandemic in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 341–360. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005510>
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2021). Kemiskinan perkotaan dan dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(2), 201–220. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1901234>
- Sysnanda, D. F. C., Diansiwi, P., & Handoko, F. B. (2024). Evaluasi program Bantuan Langsung Tunai bagi keluarga miskin di Kota Surabaya. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2) <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6265>